



Fraksi di DPRD Kalbar Pertanyakan LHP BPK 2012

"Fraksi PAN DPRD Kalbar sudah menyurati Ketua DPRD Kalbar, dengan surat No/F.PANDPRD/VII/2013, surat itu meminta kepada Pimpinan DPRD segera mendistribusikan LHP BPK kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar, namun tidak ada jawaban,"

Ikhwani A Rachim

PONTIANAK. Meski sudah diserahkan melalui paripurna di Balaiung Sari DPRD Kalbar 4 Juli 2013 lalu, hingga saat ini Fraksi-Fraksi di parlemen belum menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kalbar. Sejumlah Fraksi di lembaga yang dipimpin Minsen SH itu pun meradang.

"Hingga digelarnya rapat paripurna penyampaian PU Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2012 hari ini (kemarin, red), kami belum juga mendapatkan dokumen LHP BPK tersebut," tegas Ir Ikhwani A Rachim, Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar kepada wartawan, Rabu (24/7) usai paripurna.

Padahal, dikatakan politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini, dokumen LHP BPK tersebut sangat penting bagi dalam menyusun Pemandangan Umum (PU). "LHP BPK itu sangat dibutuhkan anggota Fraksi PAN untuk menyusun PU Fraksi sehingga kita bisa

dipelajari hasil-hasil pemeriksaan keuangan seperti apa," ujar Ikhwani.

Kekesalan fraksi PAN pun semakin memuncak ketika Ketua DPRD Kalbar Minsen SH tidak merespon surat dari pihaknya soal belum diterimanya LHP BPK tersebut. "Fraksi PAN DPRD Kalbar sudah menyurati Ketua DPRD Kalbar, dengan surat No/F.PANDPRD/VII/2013, surat itu meminta kepada Pimpinan DPRD segera mendistribusikan LHP BPK kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar, namun tidak ada jawaban," ungkap Ikhwani.

Ia menuntut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2012.

Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalbar oleh Anggota VI BPK Rizal Djalil kepada Gubernur Kalbar Cornelis, pada 4 Juli 2013. "Tapi sampai sekarang kami belum menerima dokumen LHP BPK tersebut. Ada apa ini?" Tanya Ikhwani.

Sementara itu Fraksi PKS juga menyurati Ketua DPRD Kalbar agar segera mendistribusikan dokumen LHP BPK-RI 2012

melalui suratnya tertanggal 23 Juli 2013 dengan nomor 15/PKS/VII/2013.

"Fraksi PKS memandang perlu agar segera dokumen LHP BPK-RI, untuk dapat dipelajari," pungkas H Fatahilla Abrar, S.Ag, Ketua Fraksi PKS DPRD Kalbar ini. (jul)



Ikhwani A Rachim